



JPPISB

Vol.01 No.02(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

E-issn : 2809-9508

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.501>

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* (STUDI KASUS DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016-2020)

Sitri Wahyuni¹, Dewi Sartika², Fitrah Mulyani³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas Padang, Jln. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat
sitriwahyuni18@gmail.com

Abstract

This study uses data collection methods from literature and documentation studies. The purpose of this study is to measure the performance of the realization of the Padang City Government APBD from 2016 to 2020. This study uses the value for money method with the formula for economic ratios, efficiency and effectiveness. The data used is the APBD data and the APBD Realization of the Padang City Government from 2016 to 2020. Based on the results of this study, the 2016 to 2020 economic ratio is considered economical because the percentage is less than 100%, efficiency ratios the 2016 and 2018 are considered inefficient because the percentage is more than 100%, 2019 is considered efficient balanced because the percentage is the same 100% is the same, 2017 and 2020 are considered efficient because the percentage is less than 100%, and the effectiveness of the 2016 to 2020 ratio is considered ineffective because the percentage is less than 100%.

Keyword: APBD and RAPBD, Value For Money, Padang City Government

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja realisasi APBD Pemerintah Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode value for money dengan rumus rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Data yang digunakan adalah data APBD dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang dari tahun 2016 hingga 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini, rasio ekonomi 2016 hingga 2020 dinilai ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%, rasio efisiensi Tahun 2016 dan 2018 dianggap tidak efisien karena persentasenya lebih dari 100%, 2019 dianggap efisien seimbang karena persentasenya sama 100% sama, 2017 dan 2020 dianggap efisien karena persentasenya kurang dari 100%, dan efektifitas rasio 2016 terhadap 2020 dinilai tidak efektif karena persentasenya kurang dari 100%.

Kata Kunci: APBD dan RAPBD, Value for money, Pemerintah Kota Padang

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pemerintah daerah memiliki hak otonomi daerah dalam menentukan perencanaan keuangan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 2010 yang berubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaaat untuk masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam anggaran.

Pemahaman ruang lingkup sektor publik di Indonesia akan mengantarkan pada pentingnya mekanisme sektor publik yang tangguh. Dalam perspektif akuntansi, reformasi organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pengembangan akuntansi manajemen. Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintah. dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan

di negara ini. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif (konsep *value for money*).

Anggaran merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selain itu juga, karena sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun atau aktivitas, maka penganggaran merupakan aktifitas yang penting. Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas

pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam mengukur seberapa efektif dan efisien pelaksanaan keuangan yakni Anggaran pendapatan dan belanja daerah akan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah maka, diperlukan suatu alat ukur kinerja pemerintah yaitu *value for money*.

Menurut (Mardiasmo, 2009: 4) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen yang kedua dari konsep *value for money* ialah efisiensi. Efisiensi yaitu pencapaian output dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang di peroleh, maka semakin bagus pula kinerja organisasi sektor publik tersebut. Dan elemen yang terakhir dari konsep *value for money* yaitu efektifitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Konsep *value for money* (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi

ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari istilah kita bisa mengetahui apakah kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja disuatu organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kota Padang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2016 sampai 2020 Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang paling besar diantara kota/kab lainnya, begitu juga dengan belanja Kota Padang merupakan pengeluaran yang paling besar dari kab/kota lain.

Tahun anggaran 2018 pendapatan daerah yang direncanakan mencapai Rp2,35 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp25,76 miliar atau 1,11% dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2018 yakni sebesar Rp2,32 triliun. Tahun anggaran 2019 APBD digunakan untuk mengakomodir sasaran dan 10 program unggulan sesuai visi dan misi walikota dan walikota yang diselaraskan dengan tema pembangunan di 2019 sesuai RPJMD Kota Padang 2014-2019 yakni peningkatan pelayanan publik. Tahun anggaran 2019 dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya lebih dari Rp200 miliar kenaikan. (<https://sumbar.antarnews.com/>)

Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja APBD
Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun
2016-2020

Tahun	APBD	
	Pendapatan	Realisasi

2016	2.000.873.481.496,00	2.345.757.224.592,62
2017	2.177.091.356.188,00	2.339.522.587.754,21
2018	2.360.791.801.476,00	2.486.534.455.451,57
2019	2.692.438.463.837,32	2.748.605.226.492,32
2020	2.384.064.726.834,00	2.401.183.162.045,08

Daerah dengan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2016-2020?

Adapun tujuan peneliti sebagai berikut:
Untuk mengetahui Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2016-2020

Tabel 1.2
Pendapatan dan Belanja Realiasi APBD Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi APBD	
	Pendapatan	Realisasi
2016	1.969.422.052.716,92	2.173.503.996.314,00
2017	2.092.277.707.122,03	2.077.455.348.192,00
2018	2.160.375.621.454,61	2.177.972.844.481,00
2019	2.350.116.615.606,61	2.351.499.268.939,71
2020	2.167.625.242.572,67	2.139.909.477.473,78

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang 2016-2020, telah diolah kembali

Dari tahun 2016 sampai 2019 Realisasi pendapatan Kota Padang Mengalami Peningkatan, tahun 2020 realisasi pendapatan mengalami penurunan dan untuk belanja tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi ditahun 2018 dan tahun 2019 realisasi pendapatan meningkat, ditahun 2020 pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan untuk Anggaran pendapatan Tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami Penurunan. Belanja tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas Maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul: “*Analisis Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Menggunakan Metode Value For Money pada Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020*”

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja

METODE PENELITIAN

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur, jurnal atau penelitian ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa jurnal dan beberapa buku.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini. Dokumen yang digunakan adalah Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang yang penulis peroleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Ekonomi

Dalam konteks organisasi pemerintahan ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan. Untuk mengukur rasio

ekonomi dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Dengan menggunakan rumus diatas, maka rasio ekonomi Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

$$2016 = \frac{2,173,503,996,314.00}{2,345,757,224,592.62} \times 100\% = 93\%$$

$$2017 = \frac{2,077,455,348,192.00}{2,339,522,587,754.21} \times 100\% = 89\%$$

$$2018 = \frac{2,177,972,844,481.00}{2,486,534,455,451.57} \times 100\% = 88\%$$

$$2019 = \frac{2,351,499,268,939.71}{2,748,605,226,492.32} \times 100\% = 86\%$$

$$2020 = \frac{2,139,909,477,473.78}{2,401,183,162,045.08} \times 100\% = 89\%$$

Tabel 3.1

Rasio ekonomi Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2020

Rasio Ekonomi Pemerintah Kota Padang	
Tahun	Persentase
2016	93%
2017	89%
2018	88%
2019	86%
2020	89%

Sumber: Data Diolah 2016-2020

Dari hasil perhitungan rasio ekonomi pada Pemerintah Kota Padang tahun 2016 sampai 2020 dapat dinilai ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%. Dengan nilai persentase pada tahun 2016 sebesar 93% , tahun 2017 sebesar 89%, tahun 2018 sebesar 88%, tahun 2019 sebesar 86% dan tahun 2020 sebesar 89%.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Berdasarkan rumus diatas, maka rasio efisiensi Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

$$2016 = \frac{2,173,503,996,314.00}{1,969,422,052,716.92} \times 100\% = 110\%$$

$$2017 = \frac{2,077,455,348,192.00}{2,092,277,707,122.03} \times 100\% = 99\%$$

$$2018 = \frac{2,177,972,844,481.00}{2,160,375,621,454.61} \times 100\% = 101\%$$

$$2019 = \frac{2,351,499,268,939.71}{2,350,116,615,606.61} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$2020 = \frac{2,139,909,477,473.78}{2,167,625,242,572.67} \times 100\%$$

$$= 99\%$$

Tabel 3.2

Rasio efisiensi Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2020

Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Padang	
Tahun	Persentase
2016	110%
2017	99%
2018	101%
2019	100%
2020	99%

Sumber: data diolah 2016-2020

Dari hasil perhitungan Rasio efisiensi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016 sebesar 110% persentase ini masuk pada kategori tidak efisien karena lebih dari 100%. Tahun 2017 rasio efisiennya sebesar 99% persentase ini masuk pada ketegori efisien Karena kurang dari 100%. Tahun 2018 sebesar 101% persentase ini masuk pada kategori tidak efisien dan pada tahun 2019 sebesar 100% persentase ini masuk pada kategori efisien berimbang. Tahun 2020 sebesar 99% persentase ini termasuk pada kategori efisiens.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Dimana *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Sehingga ukuran efektivitas dapat diartikan sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan

Ketentuan:

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektif berimbang

Berdasarkan rumus diatas, maka rasio efektifitas Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

$$2016 = \frac{1,969,422,052,716.9}{2,000,873,481,496.0} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

$$2017 = \frac{2,092,277,707,122.03}{2,177,091,356,188.00} \times 100\%$$

$$= 96\%$$

$$2018 = \frac{2,160,375,621,454.61}{2,360,791,801,476.00} \times 100\%$$

$$= 92\%$$

$$2019 = \frac{2,350,116,615,606.61}{2,692,438,468,837.32} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

$$2020 = \frac{2,167,625,242,572.67}{2,384,064,726,834.00} \times 100\%$$

$$= 91\%$$

Tabel 3.3

Rasio efektifitas Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2020

Rasio Efektifitas Pemerintah Kota Padang	
Tahun	Persentase
2016	98%
2017	96%
2018	92%
2019	87%
2020	91%

Sumber: data diolah, 2016-2020

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas Pemerintah Kota Padang dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dinilai tidak efektif karena persentasenya kurang dari 100% . dengan nilai persentase tahun 2016 sebesar 98%, tahun 2017 sebesar 96%, tahun 2018 sebesar 92%, tahun 2019 sebesar 87% dan tahun 2020 sebesar 91%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *value for money* pada Pemerintah Kota Padang yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi untuk tahun 2016 sebesar 93%, tahun 2017 sebesar 89%, tahun 2018 sebesar 88%, tahun 2019 sebesar 86%, tahun 2020 sebesar 89%. Maka rasio ekonomi Pemerintah Kota Padang tahun 2016 sampai 2020 kurang dari 100% berarti ekonomis.
2. Rasio Efisiensi untuk tahun 2016 sebesar 110% maka berarti tidak efisien, tahun 2017 sebesar 99% maka berarti efisien, tahun 2018 sebesar 101% maka tidak efisien, tahun 2019 sebesar 100% maka berarti efisien berimbang, dan tahun 2020 sebesar 99% maka berarti efisien.
3. Rasio Efektivitas untuk tahun 2016 sebesar 98%, tahun 2017 sebesar 96%, tahun 2018 sebesar 92%, tahun 2019 sebesar 87% dan tahun 2020 sebesar 91%. Maka rasio efektifitas Pemerintah Kota Padang tahun 2016 sampai 2020 kurang dari 100% berarti tidak efektif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada pemerintah daerah kota padang tahun 2016 dan 2019 tidak efisien karena persentasenya kurang dari 100% dan tahun 2019 efisien berimbang karena persentasenya sama 100% sedangkan untuk rasio efektivitas dari tahun 2016 sampai 2020 tidak efektif

karena persentasenya kurang dari 100%, maka dari itu Pemerintah Kota Padang perlu meninjau penentuan target-target yang akan datang dan menyusun strategi agar rasio efisiensi dan efektivitas ditahun yang akan datang lebih baik dari tahun sebelumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat- nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Studi DIII Akuntansi pada Universitas Dharma Andalas. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa kuliah sampai penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan hidayah dan petunjuk bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt selaku Rektor Universitas Dharma Andalas.
3. Bapak Dr. Emrizal, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharma Andalas, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Ibu Nino Sri Purnama Yanti, SE, M Si, Ak, CA Selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.
5. Ibu Dewi Sartika, SE, M.Si Selaku dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen-Dosen D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dharma Andalas yang selalu mengarahkan penulis serta memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

7. Tersayang untuk kedua orang tua, kakak dan adik yang selalu memberikan doa, semangat serta support baik secara material dan moral.
8. Untuk sahabat saya Tiara Anisah dan Indah Cahaya Rimbunan teman seperjuangan sampai wisuda yang telah memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk teman saya Indah Puspita yang telah membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh mahasiswa/i jurusan D-III Akuntansi Universitas Dharma Andalas terutama BP 2018 atas semua waktu yang telah kita lewati bersama.
11. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D. (2017). Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–15.
- Egi Ahmad Fahrozy¹, Ana Sopanah², I. D. N. (1967). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money pada Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–12.
- Handoko, M., & Subardjo, A. (2017). Metode Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Rumah Sakit Umum Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(11).
- Harindra, I. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Hidayat, R. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Honga, A., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.
- Juwita, R., Tanjung, R., & Sundari, R. (2018). Implementasi akuntansi manajemen sektor publik terhadap penetapan target pendapatan di cabang pelayanan badan pendapatan daerah propinsi jawa barat. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 10(1), 29–41.
- Maranda, S. M., & Budi, R. I. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. (Y. Andi, Ed.) (IV). Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri, R. I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (2020).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015.

Accountability, 6(1), 45.

- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Sakinah, D. A. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Periode 2017-2018. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sari, N. C. F. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1).
- Undang-Undang, R. I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004).
- Widjanarko, A. C. N., & Handayani, N. (2018). Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(4).
- Wildani, R. W. (2019). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money pada dinas administrasi ekonomi dan pembangunan Kota Batu. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zain, W. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Universitas Negeri Makassar.